

**TAHUN
2020**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

Jalan Sagan III/4 Yogyakarta

Telp. : (0274) 512386 Faksimili (0274) 560386

Website : <http://www.dislautkan.jogjaprov.go.id>

Email: dislautkan@jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2018-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2021
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY



Ir. Bayu Murti Sasongka, M.Si
NIP. 196411021991121001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2020 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)”:
 - Diukur dengan indikator nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yakni Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Produksi Perikanan Tagkap, Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Pelabuhan dan Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar 325.357 juta rupiah sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi 324,21 juta rupiah. Capaian ini belum sesuai dengan target dikarenakan dampak dari menurunnya pertumbuhan ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 99,65%
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebesar 301,50 juta rupiah terjadi peningkatan sebesar 107,53%
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya status kawasan konservasi”:
 - Diukur dengan indikator Persentase peningkatan status per tahapan kawasan konservasi.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

- Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebanyak 60 persen, sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 terealisasi 30 persen. Capaian ini belum sesuai target dikarenakan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 50%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebanyak 100% terjadi penurunan sebanyak 50%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Diperlukan inovasi program dan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan PDRB subsektor perikanan. Pendapatan nelayan, pembudidaya maupun pengolah perlu ditingkatkan lagi melalui pendampingan dan penyediaan sarana prasarana produksi.
2. Penyelesaian tahapan kawasan konservasi perlu perhatian lebih karena terkait dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu target penetapan kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2022 harus dipersiapkan mulai dari sekarang agar tercapai.
3. Pemasaran produk perikanan dan kelautan akan melalui *marketplace* serta pemasaran *e-comerse* untuk meningkatkan omzet penjualan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	9
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.4 Isu-isu Strategis	12
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	13
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	18
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	19
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2020	20
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020	26
3.2. Realisasi Anggaran.....	47
3.3. Inovasi.....	48
BAB IV PENUTUP.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	53

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan dan Jenis Kelamin	13
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	16
Tabel I.3	Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020	16
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017-2022	19
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	19
Tabel II.3.1	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020	20
Tabel II.3.2	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020	21
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2020.....	23
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja (Reviu) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2020	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2020	27
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	27
Tabel III.4	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan.....	28
Tabel III.5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	29
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	31
Tabel III.7	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	32
Tabel III.8	Capaian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020	33
Tabel III.9	Anggaran dan Realisasi Belanj Langsung per Sasaran Tahun 2020	47
Tabel III.10	Anggaran BTT Dinas Kelautan dan Perikanan 2020	48
Tabel III.11	Penghargaan 2020	51

Daftar Gambar

Gambar I.1.	Cascading Kinerja	9
Gambar I.2.	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	10
Gambar I.3.	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	11
Gambar II.1.	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	24
Gambar II.2.	Tampilan Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	25
Gambar III.1.	Penjualan hasil Budidaya secara online dan Jejaring di Kompleks Kepatihan	31
Gambar III.2.	Probiotik untuk Udang Vanamei	49
Gambar III.3.	Pelayanan Terpadu di PPP Sadeng	50
Gambar III.4.	Limbah Organik Untuk Kemandirian Pakan Ikan (Ikan Mapan)	51

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

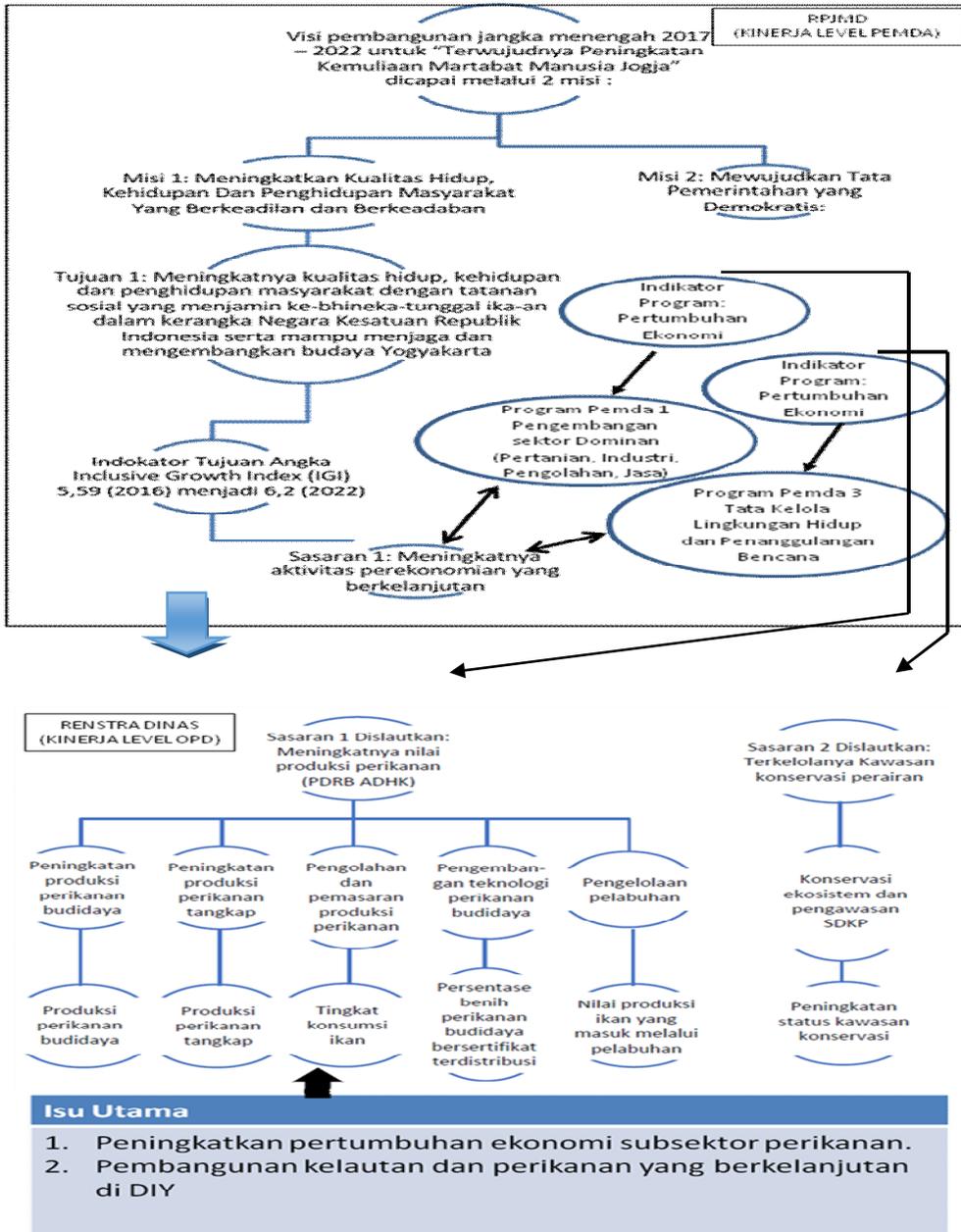
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

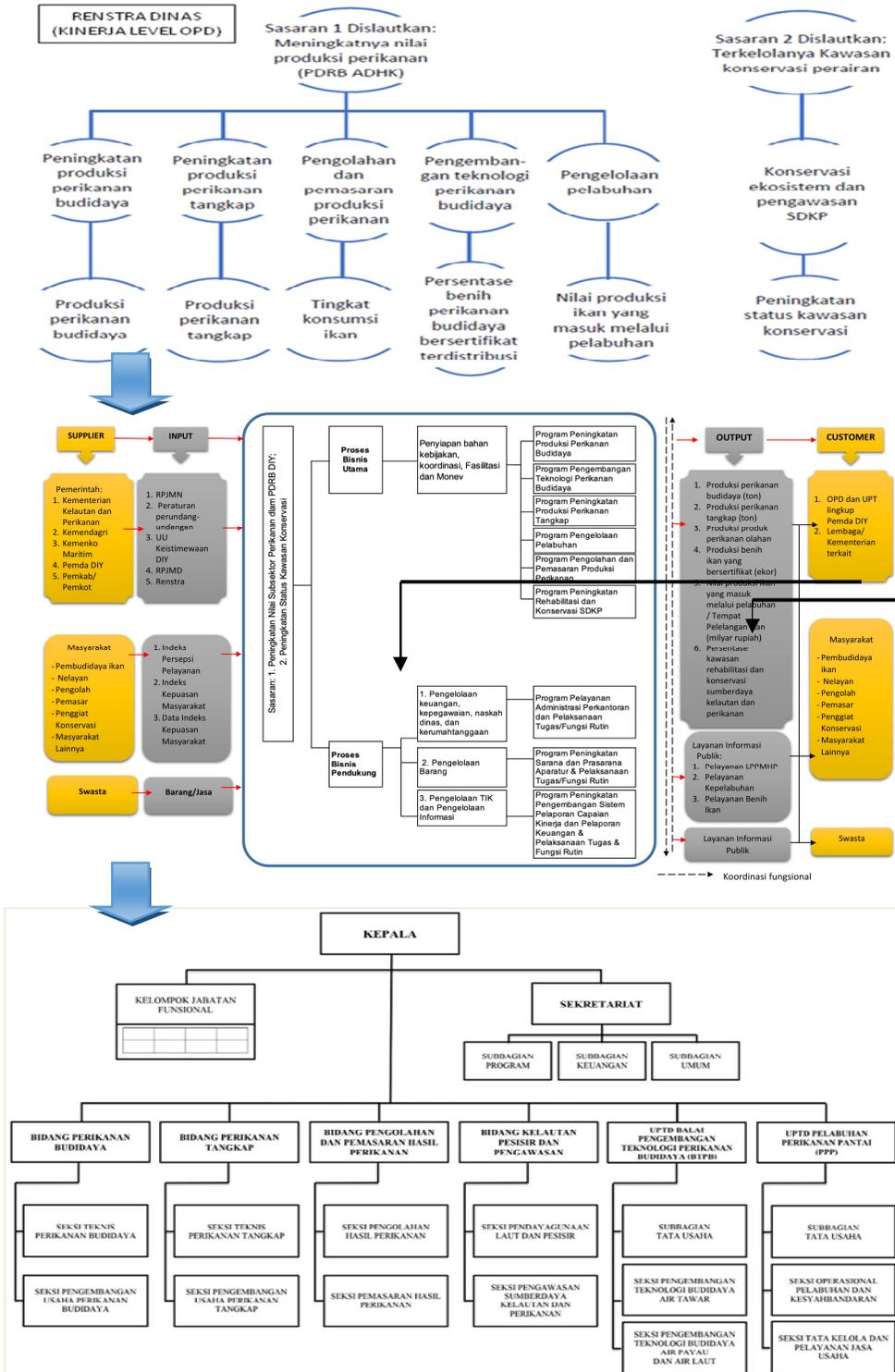
Gambar I.1 Cascading Kinerja



1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan DIY



1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Adapun fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagai berikut

1. Penyusunan program kerja Dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
4. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
5. Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
6. Pengembangan teknologi perikanan budidaya;
7. Pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
8. Perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
9. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
10. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
11. Penerbitan rekomendasi izin penangkapan ikan;
12. Penerbitan rekomendasi izin budidaya ikan antar Kabupaten/Kota dalam DIY;
13. Penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
14. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, adat istiadat dan tradisi luhur bidang kelautan dan perikanan;
15. Fasilitasi perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
16. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
17. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
18. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
19. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan Perikanan;



Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbag Umum 2) Kasubbag Keuangan 3) Kasubbag Program 3. Kabid Perikanan Budidaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Teknis Perikanan Budidaya 2) Kasi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya 4. Kabid Perikanan Tangkap: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Teknis Perikanan Tangkap 2) Kasi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap 5. Kabid Kelautan, Pesisir dan Pengawasan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Pendayagunaan Laut dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Kasubbag Umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penata Kearsipan 2) Pengadministrasi Umum 3) Pengelola Barang Milik Negara 2. Dibawah Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Verifikator Data Laporan Keuangan 2) Pengelola Akuntansi 3) Bendahara 4) Pengelola Gaji 3. Dibawah Kasubbag Program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Pengelola Sistem dan Jaringan 4. Dibawah Kasi Teknis Perikanan Budidaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perikanan Budidaya 3) Calon Pengawas Perikanan Pertama

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
Pesisir 2) Kasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 6. Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan: 1) Kasi Pengolahan Hasil Perikanan 2) Kasi Pemasaran Hasil Perikanan 7. Jabatan Fungsional: 1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 2) Pengawas Benih Ikan 3) Pengawas Perikanan	5. Dibawah Kasi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya: 1) Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran 2) Calon Pengawas Perikanan Pertama 6. Dibawah Kasi Teknis Perikanan Tangkap: 1) Analis Kenelayanan 2) Pengadministrasi Umum 7. Dibawah Kasi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap: 1) Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha; 8. Dibawah Kasi Pendayagunaan Laut dan Pesisir: 1) Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir; 2) Pengadministrasi Umum 9. Dibawah Kasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan: 1) Pengawas Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 2) Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir 10. Dibawah Kasi Pengolahan Hasil Perikanan: 1) Analis Mutu Hasil Perikanan; 11. Dibawah Kasi Pemasaran Hasil Perikanan: 1) Pengelola Pemasaran;

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta melalui mekanisme KPBU yang telah diinisiasi oleh Tim Percepatan bersama Bappenas. Dan sudah sampai pada penyusunan DPP (Daftar Prioritas Proyek) oleh PT. PII yang didanai oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya untuk mendapatkan pendanaan OBC (Outline Business Case) dari Bappenas harus menyatukan dulu asetnya (BBWSO, Perhubungan, Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY). SKB Tiga Menteri sudah dikomunikasikan dengan Kemenkomaritim. Ditindaklanjuti dengan survey lokasi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta. Kemenkopolkum juga ikut serta membantu mengkoordinasikan penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarta.
2. Untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan membuka akses jalur selatan, maka akan dibangun Pelabuhan Perikanan Gesing di Gunungkidul

dengan dana APBD. Tahun 2020 telah dibuat Masterplan PPI Gesing dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah PPI Gesing . Selanjutnya pada tahun 2021 akan dibuat Dokumen DED, Amdal dan rencana pembebasan tanah melalui appraisal.

3. Pengembangan Paket Teknologi Budidaya. Telah dirintis pengembangan Pakan Mandiri dengan bahan baku murah. Telah dilakukan kegiatan sarasehan pakan mandiri, untuk substitusi pakan bagi pembudidaya. Kegiatan yang terkait dengan benih ikan berkualitas telah dilakukan di 2020 serta mengoptimalkan peran UPTD Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (UPTD BTPPB) untuk menghasilkan benih dan calon induk serta induk unggul yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Jabatan Struktural						
1	Kepala Dinas	1	S1	1	S2	√	
2	Sekretariat	1	S1	1	S2	√	
3	Kabid Perikanan Budidaya	1	S1	1	S2	√	
4	Kabid Perikanan Tangkap	1	S1	1	S2	√	
5	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	S1	1	S1		√
6	Kabid Kelautan, Pesisir dan Pengawasan	1	S1	1	S2		√
7	Subbagian Program	1	S1	1	S2	√	
8	Subbagian Keuangan	1	S1	1	S1		√
9	Subbagian Umum	1	S1	1	S2		√
10	Seksi Teknis Perikanan Budidaya	1	S1	1	S2	√	
11	Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya	1	S1	1	S2		√
12	Seksi Teknis Perikanan Tangkap	1	S1	1	S1	√	
13	Seksi Pengembangan Usaha	1	S1	1	S2		√

Sumber: Data Kepegawaian Biro Desember 2019

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perikanan Tangkap						
14	Seksi Pengolahan Hasil Perikanan	1	S1	1	S1	√	
15	Seksi Pemasaran Hasil Perikanan		S1	1	S1	√	
16	Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir	1	S1	1	S2		√
17	Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1	S1	1	S1	√	
B	Jabatan Pelaksana Substantif						
18	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	4	S1	4	S1, S2	√√	√√
19	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	S1, D4	0			
20	Analisis Perikanan Budidaya	5	S1	1	S1	√	
21	Analisis Kenelayanan	5	S1	2	D3,S2	√	
22	Analisis Mutu Hasil Perikanan	5	S1	3	S1, SMA	√√	√
23	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	5	S1	1	D4		√
24	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	5	S1	2	S1,S2	√√	
25	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	5	S1	1	S2	√	
26	Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5	S1	2	S1,D4	√	√
27	Pengawas perikanan (JFT)	10	S1	4	S1	√√	√√
28	Pengelola Pemasaran	5	S1	2	S1, S2	√	√
C	Jabatan Pelaksana Pendukung/Administratif						
29	Bendahara	2	S1	2	S1, D3		√√
30	Pengadministrasi Keuangan	4	D3	0			
31	Pengelola Gaji	1	D3	1	SMA	√	
32	Pengelola Akuntansi	1	D3	1	D3		√
33	Verifikator Data laporan Keuangan	1	D3	1	D3		√
34	Pengadministrasi Umum	4	D3	0			
35	Pengadministrasi	1	D3	0			

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persuratan						
36	Pranata Kearsipan	1	D3	1	SMA		√
37	Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	2	S1, SMA	√	√
38	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	0			
39	Pengelola Barang Milik Negara	3	D3	3	S1, D3, SMA	√	√√
40	Pengemudi	1	SMA	0			
41	CPNS			0			
	Jumlah	91		50		26	24

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kelautan dan Perikanan DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 23 orang (46%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 15 orang (30%), D4 sebanyak 2 orang (4%), D3 sebanyak 5 orang (10%) dan SLTA sebanyak 5 orang orang (10%).

Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; untuk jabatan struktural berimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 41 orang, terdiri dari 32 orang pejabat pelaksana substantif dan 9 pejabat pelaksana administratif. Tidak ada pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif dan tidak ada yang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif. Terdapat satu Jabatan Pelaksana substantif yang belum terisi yakni Pengelola Sistem Jaringan serta 6 Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif, yakni Pengadministrasi Keuangan, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Persuratan, Teknisi Sarana dan Prasarana dan Pengemudi. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap Tanah	20 bidang	13.892.166.000
2	Peralatan dan Mesin	2.722 unit	18.671.866.674,18
3	Gedung dan Bangunan	129 unit	72.641.224.887,98
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	197 unit	123.581.995978,00
5	Aset Tetap Lainnya	4.047 unit	392.770.500
	Jumlah		173.836.483.237,82

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2020

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 7 (tujuh) unit kendaraan operasional, dan 21 (dua puluh satu) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1: 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Berikut disajikan Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2019-2020:

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2019	Rp. 7.378.165.899,00	Rp. 24.551.448.620,00	Rp. 31.929.614.519,00
2020	Rp. 8.473.091.847,00	Rp. 13.529.536.110,00	Rp. 22.002.627.957,00

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2020 dibanding tahun 2019 terdapat kenaikan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.1.094.925.948,00 atau sebesar 14,84%. Namun terdapat penurunan anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 11.021.912.510,00 atau 44,89% dari anggaran tahun lalu akibat adanya *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/00867 tanggal 13 April 2020, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem AKIP Tahun 2019 pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Rekomendasi: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan berupaya meningkatkan kinerja pada Aspek Perencanaan Kinerja khususnya Implementasi Renstra untuk mencamtumkan inovasi pada dokumen Renstra yang telah direviu, Aspek Pengukuran Kinerja khususnya Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja agar pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala,Aspek Pelaporan Kinerja, khususnya pada penyampaian informasi kinerja yang informatif dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organsiasi, khususnya Kinerja yang dilaporkan pada capaian kinerja lebih baik dari sebelumnya (output dan IKU).</p>	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dislautkan akan menambahkan inovasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dan telah diisikan juga di Aplikasi Sengguh. 2. Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja setiap bulan dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tanggal 3 tiap bulannya. 3. Laporan SAKIP tahun 2020 akan memuat tentang penyampaian informasi kinerja yang informatif dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organsiasi baik output maupun IKU di eselon 2 dan eselon 3 dengan tetap berkoordinasi dengan Biro Organisasi.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan yang didukung oleh program pengembangan sektor dominan (pertanian, industri pengolahan, jasa). Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY selama lima tahun adalah:

“Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”

Adapun sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)	Juta rupiah	317.809	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897	331.897
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	%	N/A	20	30	60	80	100	100

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan fondasi pada SDM aparatur dan masyarakat, kelembagaan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan Penguatan daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan 	<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK</p> <p>Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan</p> <p>Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk olahan</p> <p>mengembangkan sistem pemasaran yang modern</p>
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi 	<p>Memberdayakan potensi alam dan masyarakat berwawasan lingkungan</p> <p>Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>Menggerakkan partisipasi masyarakat</p>

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2020 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Sasaran		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatkan nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	1.1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2,149,305,520	407,147,520	(1,742,158,000)
	1.1.1.	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	1,730,798,520	314,790,520	(1,416,008,000)
	1.1.2.	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	418,507,000	92,357,000	(326,150,000)
	1.2	Program Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	3,558,445,500	1,799,393,800	(1,759,051,700)
	1.2.1	Pengolahan Hasil Perikanan	1,220,917,000	464,860,800	(756,056,200)
	1.2.2	Pemasaran Hasil Perikanan	1,787,528,500	707,191,000	(1,080,337,500)
	1.2.3	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	550,000,000	627,342,000	77,342,000
	1.3	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,099,987,120	1,973,043,120	(1,126,944,000)
	1.3.1	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	1,050,032,000	697,997,000	(352,035,000)
	1.3.2	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	2,049,955,120	1,275,046,120	(774,909,000)
	1.4	Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya	3,075,975,820	1,992,061,510	(1,083,914,310)
	1.4.1	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan	209,622,000	194,207,200	(15,414,800)
	1.4.2	Perbanyak Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	2,866,353,820	1,797,854,310	(1,068,499,510)
	1.5	Program Pengelolaan Pelabuhan	236,644,000	91,118,750	(145,525,250)
	1.5.1	Pelayanan Pelabuhan Perikanan	105,444,000	81,891,750	(23,552,250)
1.5.2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	131,200,000	9,227,000	(121,973,000)	
	1.6	Program Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya	1,000,000,000	1,783,547,000	783,547,000

Sasaran		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.6.1	Pengembangan Budaya Bahari	1,000,000,000	1,783,547,000	783,547,000
	1.6.2	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 1	13.120.357.210	8.046.311.700	(5.074.046.260)
2. Meningkatnya status kawasan konservasi	2.1	Program Konservasi Ekosistem Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	835,764,750	421,563,350	(414,201,400)
	2.1.1	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	229,507,250	99,865,850	(129,641,400)
	2.1.2	Gerakan Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan	106,097,500	3,084,500	(103,013,000)
	2.1.3	Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	323,840,000	317,413,000	(6,427,000)
	2.1.4	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	176,320,000	1,200,000	(175,120,000)
	2.2	Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	150,000,000	-	(150,000,000)
	2.2.1	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	150,000,000	-	(150,000,000)
			Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	985.764.750	421.563.350
		Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran	14.106.122.710	8.467.875.000	(5.638.247.660)

Struktur program dan kegiatan pendukung Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	1. PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	4,270,360,500	3,714,919,060	(555,441,440)
	1.1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1,963,263,042	1,988,724,700	25,461,658
	1.2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,466,197,458	1,370,338,210	(95,859,248)
	1.3 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi			

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	dan Konsultasi	840,900,000	355,856,150	(485,043,850)
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3,659,036,000	1,249,005,000	(2,410,031,000)
	2.1 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	315,477,000	108,880,000	(206,597,000)
	2.2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	495,540,000	299,546,000	(195,994,000)
	2.3 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	375,775,000	230,438,000	(145,337,000)
	2.4 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	778,762,000	523,071,000	(255,691,000)
	2.5 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	131,140,000	87,070,000	(44,070,000)
4.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	224,680,000	97,737,000	(126,943,000)
	4.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5,000,000	5,000,000	-
	4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	32,000,000	21,045,000	(10,955,000)
	4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	141,840,000	50,980,000	(90,860,000)
	4.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	45,840,000	20,712,000	(25,128,000)
	Total Anggaran Pendukung	8.154.076.500	5.061.661.060	(3.092.415.440)

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Subsektor perikanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	325,357	Triwulan I	325,357
					Triwulan II	325,357
					Triwulan III	325,357
					Triwulan IV	325,357
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	persen	60	Triwulan I	30
					Triwulan II	30
					Triwulan III	30
					Triwulan IV	60

Pada tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020. Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja (Reviu) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Subsektor perikanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	325,357	Triwulan I	325,357
					Triwulan II	325,357
					Triwulan III	325,357
					Triwulan IV	325,357
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	persen	60	Triwulan I	30
					Triwulan II	30
					Triwulan III	30
					Triwulan IV	60

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 39,22% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV (Sumber BPS)
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga

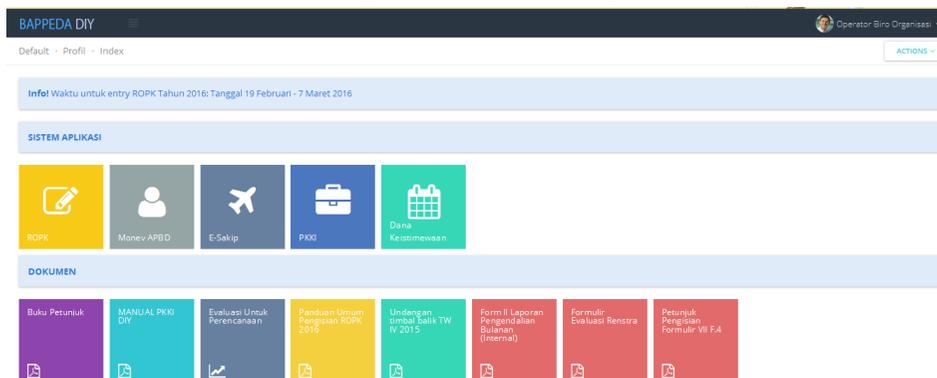
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi Rp. 1.193.720.000,00

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP : Rp. 280.223.000,00
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap : Rp. 143.477.000,00
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya : Rp. 423.080.000,00
- Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : Rp. 194.794.000,00
- Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan : Rp. 70.396.000,00
- Program Pengelolaan Ruang Laut : Rp. 81.750.000,00

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga mengelola website sebagai berikut:

Gambar II.2 Tampilan Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY



Sumber: <http://dislautkan.jogjaprovo.go.id/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2020. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2019	TAHUN 2020				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	<u>Indikator:</u> Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) <u>Meta Indikator:</u> Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) yang dikeluarkan oleh BPS	Juta rupiah	317,809	301,50	325,357	324,21	99,65	Sangat Baik	331,897
2	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	<u>Indikator:</u> Peningkatan status kawasan konservasi <u>Meta Indikator:</u> 1. Tahap Penetapan RZWP, Inisiasi Kawasan konservasi 20% 2. Pencadangan kawasan konservasi, 30% 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi 60% 4. Penetapan Kawasan Konservasi 80% 5. Penataan Batas Kawasan 100%	persen	N/A	20	60	30	50	Sangat Rendah	100

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya nilai produksi perikanan

Kinerja sasaran terwujudnya meningkatnya nilai produksi perikanan diukur dengan indikator nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK). Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) yang dikeluarkan oleh BPS

Pada tahun 2020 produksi perikanan mencapai 100.392,15 Ton. Dibandingkan tahun lalu produksi ini mengalami penurunan sebesar 15.526,14 Ton atau 13,39% Meski demikian nilai produksi perikanan mengalami kenaikan dari 2.376.324.954 rupiah menjadi 2.387.834.260 rupiah.

Tabel III.4 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan

Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
2014	71.960,99	1.335.969.356
2015	74.705,24	1.417.009.418
2016	81.876,80	1.627.339.093
2017	95.365,52	1.895.433.672
2018	102.432,64	2.074.261.142
2019	115.918,29	2.376.324.945
2020	100.392,15	2.387.834.260

(Sumber : Dislautkan,2020)

Sektor pertanian secara umum termasuk perikanan tidak terdampak langsung pandemi covid. Pada awal pandemi budidaya perikanan sedikit terdampak karena banyaknya hotel, restoran dan catering yang tutup, tetapi dengan beriringanya waktu mereka melakukan inovasi untuk sistem penjualannya sehingga produknya dapat terserap langsung oleh konsumen. Perikanan tangkap tidak banyak terdampak karena nelayan tetap bisa melaut dan produksinya meningkat dibanding tahun lalu. Dimasa pandemi ini ikan banyak dicari sehingga harganya tidak turun.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mempunyai kontribusi besar dalam pembentukan PDRB DIY laju perkembangannya termasuk lambat baik atas dasar harga berlaku maupun perkembangan riil atas dasar harga konstan. Hal ini menunjukkan masih minimnya inovasi untuk meningkatkan nilai tambah aktivitas ekonomi dalam lingkup pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, sehingga perlu terobosan teknologi untuk pengelolaan usaha agar produktivitas output meningkat.

Produk Domestik Regional (PDB/PDRB) beserta indikator turunannya merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan kegiatan

perekonomian suatu wilayah atau negara. Penghitungan PDRB dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yakni produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Untuk penghitungan tahun 2020 menggunakan proyeksi dengan metode regresi berdasarkan nilai PDRB Subsektor Perikanan tahun-tahun sebelumnya, karena data resmi dari BPS belum dirilis.

Kinerja sasaran Meningkatnya nilai produksi perikanan pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi *		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	301,50	325, 357	324,21	99,65	331,897	97,69

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya nilai produksi perikanan adalah sebagai berikut:

- Tercapai 324,21 juta rupiah dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 99,65% (sangat baik).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 301,50 juta rupiah, terdapat kenaikan sebesar 107,53% %.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2020 ini telah tercapai 97,69% sehingga diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Faktor Penghambat keberhasilan

Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) tidak mencapai target 100% dikarenakan pertumbuhan ekonomi global yang terdampak akibat pandemi

COVID-19 sehingga sedikit banyak juga mempengaruhi sektor kelautan dan perikanan.

Rendahnya PDRB sektor perikanan juga disebabkan karena menurunnya produksi perikanan, tingginya biaya produksi utamanya pakan ikan, mahalnya operasional melaut menjadi faktor yang menyebabkan menurunnya pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.

Terus dilakukan upaya untuk substitusi pakan melalui program pakan mandiri serta mengoptimalkan peran UPTD Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (UPTD BPTPB) untuk menghasilkan benih dan calon induk serta induk unggul yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Pada tahun 2020 banyak kegiatan perikanan tangkap yang *refocusing*, seperti Bimtek Kaderisasi Nelayan dan Magang Nelayan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran diefisiensi untuk penanganan Covid-19. Pada tahun 2020 dilakukan pembinaan ke kelompok nelayan dan Petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Rencana pembangunan PPI Gesing diharapkan dapat digunakan untuk berlabuh kapal motor ikan > 5 GT yang mampu beroperasi di perairan pantai sampai ZEE sehingga berujung pada peningkatan produksi perikanan tangkap. Sekaligus menciptakan sentra pertumbuhan ekonomi baru di wilayah yang masih tertinggal. Selain itu hasil tangkapan juga menurun dikarenakan dampak cuaca dimana banyaknya bulan yang ombaknya besar sehingga kapal jukung tidak bisa melaut.

Upaya yang telah dilakukan dengan adanya *refocusing* anggaran karena covid antara lain dengan tetap melakukan komunikasi baik pembinaan langsung maupun lewat grup *Whatsapp* untuk menyemangati para pelaku usaha kelautan dan perikanan. Disalurkan juga telah membantu pemasaran secara online dan ke Dinas-dinas / kompleks kepatihan untuk produksi perikanan budidaya dan hasil olahan ikan. Selain itu juga memfasilitasi pelatihan-pelatihan online yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga telah mengeluarkan Himbauan Pembelian Produk Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan DIY melalui surat edaran nomor 849/02632 tertanggal 6 April 2020 sebagai bentuk dukungan nyata dalam rangka mendorong meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk-produk hasil perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di DIY.



Gambar III. 1 Penjualan hasil Budidaya secara online dan Jejaring di Kompleks Kepatihan

3.1.2. Sasaran Terkelolanya kawasan konservasi perairan

Tolok ukur capaian sasaran Terkelolanya kawasan konservasi perairan diukur dengan indikator peningkatan status kawasan konservasi. Peningkatan status kawasan konservasi terdiri dari lima tahapan, yaitu:

1. Tahap Penetapan RZWP, Inisiasi Kawasan konservasi (20%)
2. Pencadangan kawasan konservasi (30%)
3. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (60%)
4. Penetapan Kawasan Konservasi (80%)
5. Penataan Batas Kawasan (100%)

Kawasan lindung perairan atau kawasan konservasi perairan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terkelolanya kawasan konservasi	Peningkatan status kawasan konservasi	1. Tahap Penetapan RZWP, Inisiasi Kawasan konservasi 20% 2. Pencadangan kawasan konservasi, 30% 3. Penyusunan Rencana

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	perairan		Pengelolaan dan Zonasi 60% 4. Penetapan Kawasan Konservasi 80% 5. Penataan Batas Kawasan 100%

Kawasan konservasi perairan di DIY telah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 271/KPTS/2013 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 September 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul tanggal 28 April 2014. Kawasan konservasi perairan di DIY berlokasi di Wediombo, Kabupaten Gunungkidul serta di Patehan dan Baros Kabupaten Bantul.

Tahap Penetapan RZWP, Inisiasi Kawasan konservasi telah selesai dilakukan di tahun 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038 tanggal 24 September 2018.

Tahap Pencadangan kawasan konservasi juga telah dilakukan pada tahun 2019. Sesuai surat dari Dirjen Pengelola Rang Laut Nomor 552/DJPRL.5/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 bahwa provinsi yang sudah menetapkan RZWP3K tidak perlu SK Pencadangan Gubernur. Sehingga dengan demikian DIY secara otomatis telah melakukan pencadangan kawasan konservasi melalui RZWP3K.

Kinerja sasaran **Terkelolanya kawasan konservasi perairan** pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan status kawasan konservasi (%)	30	60	30	50	100	30

Analisis Ketercapaian Sasaran 2: Terkelolanya kawasan konservasi perairan

- a. Tercapai 30%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 50% (tidak mencapai target).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 30%, tidak terdapat perbedaan pencapaian target (capaian realisasi sama dengan tahun lalu). Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (60%) tidak dapat dilaksanakan karena *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai dengan asumsi tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (60%) dilaksanakan dengan APBD murni dan tahapan Penetapan Kawasan Konservasi (80%) akan diusulkan pelaksanaannya melalui APBD Perubahan.

Faktor Penghambat keberhasilan

Pada tahun 2020 program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tercapainya sasaran ini mengalami *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, yaitu pada Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kabupaten di kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten. Sehingga tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi tidak dapat dilaksanakan.

Strategi pencapaian kinerja sasaran Terkelolanya kawasan konservasi perairan agar mencapai 100% pada tahun 2022 adalah dengan pelaksanaan tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (60%) pada tahun 2021 menggunakan anggaran APBD murni dan pelaksanaan tahapan Penetapan Kawasan Konservasi (80%) akan diusulkan pelaksanaannya melalui APBD Perubahan tahun 2021. Sehingga pada tahun 2022 dapat dilaksanakan tahapan Penataan Batas Kawasan (100%).

Tabel III. 8 Capaian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN				

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	perse	100	100	Tidak ada
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran					
	Barang cetakan	Jenis	16	16	Tidak ada
	Pembayaran jasa kebersihan kantor	lok	1	1	Tidak ada
	Pembayaran kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 2	unit	21	21	Tidak ada
	Pembayaran tagihan telepon	Bulan	12	12	Tidak ada
	Pembayaran retribusi sampah	Bulan	12	12	Tidak ada
	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	23	23	Tidak ada
	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Tidak ada
	Surat kabar dan majalah	Jenis	8	8	Tidak ada
	Pembayaran tagihan listrik	Bulan	12	12	Tidak ada
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	bulan	9	9	Tidak ada
	Alat listrik dan elektronik	Jenis	9	9	Tidak ada
	Belanja penggandaan dan penjiilidan	Lembar	90,384	90,384	Tidak ada
	Perangko, material dan benda pos	Jenis	2	2	Tidak ada
	Alat Tulis Kantor	Jenis	38	38	Tidak ada
	Pembayaran kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 4	unit	16	16	Tidak ada
	Pengiriman dokumen	Bulan	12	12	Tidak ada
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					
	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Tidak ada
	Bukti Pembayaran Honorarium Perencana Program	orang	7	7	Tidak ada

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	orang	8	8	Tidak ada
	Bukti pembayaran honorarium keuangan/kepagawaian	orang	12	12	Tidak ada
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi					
	Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Bulan	12	12	Tidak ada
	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Tidak ada
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	os	3,318	3,318	Tidak ada
	Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Bulan	12	12	Tidak ada
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
	Meningkatnya sarana dan prasaran aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100	Tidak ada
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor					
	Rehab kamar mandi Dinas	unit	1	1	Tidak ada
	Rehab rumah gensek	unit	1	1	Tidak ada
	Pembangunan kanopi parkir kendaraan	m2	40	40	Tidak ada
	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	%	100	100	Tidak ada
	Pembangunan wastafel cuci tangan	unit	6	6	Tidak ada
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan					
	Perlengkapan kantor	Jenis	1	1	Tidak ada
	dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Tidak ada
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor					

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	Pengecatan dan perbaikan pintu kantor	buah	10	10	Tidak ada
	Pengecatan dinding	m2	2,100	2,100	Tidak ada
	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Tidak ada
	Pengecatan pintu besi gerbang dan sekeliling	m2	600	600	Tidak ada
	Pemeliharaan paving blok	m2	50	50	Tidak ada
	Pemeliharaan saluran air lingkungan kantor	m2	29	29	Tidak ada
	Pemeliharaan talang air	unit	1	1	Tidak ada
	Pengecatan dan perbaikan jendela kantor	buah	20	20	Tidak ada
	Pengecatan dinding pagar dan pembatas taman	paket	1	1	Tidak ada
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					
	dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Tidak ada
	Kendaraan Roda 2 (1 tahun)	unit	21	21	Tidak ada
	Kendaraan Roda 4 (1 tahun)	unit	15	15	Tidak ada
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan					
	Peralatan kantor terpelihara	Jenis	5	5	Tidak ada
	Perlengkapan kantor terpelihara	Jenis	3	3	Tidak ada
	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Tidak ada
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN					
	Terwujudnya peatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100	Tidak ada
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD					

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Tidak ada
	laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2020	nilai	84	86	Tidak ada
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD					
	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian dan kinerja dan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Tidak ada
	realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	%	1	1	Tidak ada
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi					
	data produksi perikanan dan kelautan	tahun	1	1	Tidak ada
	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Tidak ada
	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	dokumen	5	5	Tidak ada
	forum perencanaan OPD	kali	1	1	Tidak ada
	Publikasi media cetak dan elektronik	tahun	1	1	Tidak ada
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD					

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Tidak ada
	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	%	100	100	Tidak ada
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN				
	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan	Milyar	34.78	58.22	Tidak ada
	Pelayanan Pelabuhan Perikanan				
	Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhan	orang	30	30	Tidak ada
	Dukungan 50% thd target peningkatan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan sebesar Rp. 1,47 M dari tahun 2019 sebesar Rp. 33,31 M menjadi sebesar Rp. 34,78 M pada tahun 2020	%	100	100	Tidak ada
	Reviu masterplan PPP Sadeng	dokumen	1	1	Tidak ada
	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan				
	Kajian Penyusunan koordinat wilayah kerja daratan dan wilayah kerja perairan PPP Sadeng	dokumen	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
	Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan pelabuhan	orang	30	30	Tidak ada

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran	orang	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
	Dukungan 50% thd target peningkatan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan sebesar Rp. 1,47 M dari tahun 2019 sebesar Rp. 33,31 M menjadi sebesar Rp. 34,78 M pada tahun 2020	%	100	100	Tidak ada
PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	persen	14	43.43	Tidak ada
	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	persen	10	10	Tidak ada
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan					
	Jumlah Pengawasan terpadu di laut	kali	3	3	Tidak ada
	Jumlah Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan	kali	17	17	Tidak ada
	dukungan 35% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10% tahun 2020 dilaporkan ada 16 kejadian ilegal dalam pemanfaatan	%	100	100	Tidak ada

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	sumberdaya kelautan dan perikanan				
	Jumlah Pengawasan Mutu Produk Perikanan	kali	17	17	Tidak ada
Gerakan Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan					
	dukungan 15% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10% tahun 2020 dilaporkan ada 20 kejadian ilegal dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	100	100	Tidak ada
	jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	orang	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan					
	dukungan 15% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10% tahun 2020 dilaporkan ada 20 kejadian ilegal dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	100	100	Tidak ada

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	Populasi Sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah	ekor	990,000	990,000	Tidak ada
Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi					
	dukungan 35% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10% tahun 2020 dilaporkan ada 20 kejadian ilegal dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	100	100	Tidak ada
	penyusunan dokumen kak oerencanaan kawasan konservasi	dokumen KAK	1	1	Tidak ada
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP					
	Produksi perikanan tangkap	Ton	6,481	6,545	Produksi tangkap didukung oleh perairan umum dan daratan yang meningkat
Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap					
	produksi kelompok nelayan	ton	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
	kontribusi 60% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 5.509 ton pada tahun 2020	%	100	100	Tidak ada

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	Jumlah nelayan memiliki sertifikat BST/ketrampilan simulasi radar/penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan/perbaikan dan perawatan mesin/laminasi PMT	orang	27	27	Tidak ada
	Jumlah nelayan baru	orang	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap					
	jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan	kelompok	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
	Jumlah Kapal yang melengkapi perizinan secara OSS (Online Single Submission)	kapal	1	1	Tidak ada
	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap	dokumen	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
	kontribusi 40% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 5.509 ton pada tahun 2020	%	100	100	Tidak ada
	Jumlah Kapal yang memiliki Buku Kapal	kapal	1	1	Tidak ada
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN					
	Tingkat konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	25.48	31.24	
Pengolahan Hasil Perikanan					
	persentase hasil perikanan	%			Tidak ada

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	yang memenuhi standar mutu		75	75	
	Dukungan 35% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan menjadi 22.50 kg/kapita/tahun pada tahun 2020	%	100	100	Tidak ada
	jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	orang	450	450	Tidak ada
	produksi perikanan olahan dari kelompok madya	ton	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
	produksi perikanan olahan dari kelompok pemula	ton	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
	jumlah rekomendasi Unit Pengolah Ikan yang akan diajukan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	rekomendasi	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
	Pemasaran Hasil Perikanan				
	jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	orang	740	740	Tidak ada
	jumlah pelaku usaha yang meningkat omsetnya	orang/kelompok	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
	Dukungan 50% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan menjadi 22.50	%	100	100	Tidak ada

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	kg/kapita/tahun pada tahun 2020				
	Persentase penjualan produk olahan	%	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)					
	Dukungan 15% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan sebesar menjadi 22.50 kg/kapita/tahun pada tahun 2020	%	100	100	Tidak ada
	Terbangunnya Unit Pengolahan Ikan	unit	5	5	Tidak ada
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA					
	Produksi perikanan budidaya	Ton	89,500	93,846	Tidak ada
	TUK	satuan	target	realisasi	Tidak ada
Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya					
	Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB	unit pembudidaya/kel	5	5	Tidak ada
	produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	ton	20	20	Tidak ada
	Kontribusi 50% terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya menjadi 69.810 ton pada tahun 2020 (terdiri dari udang galah: 60 ton; nila: 21.000 ton; mas: 100 ton; gurami:10.050 ton; udang vaname: 1.500 ton; tawes: 185 ton; patin :65 ton; lele: 32.000 ton; bawal: 3.900 ton; lainnya : 1000 ton)	%	100	100	Tidak ada
Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya					

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha perikanan Budidaya (antar UPR dengan Pembudidaya)	dokumen	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
	Produksi perikanan budidaya, dari kelompok madya	ton	40	40	Tidak ada
	Kontribusi 50% terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya menjadi 69.810 ton pada tahun 2020 (terdiri dari udang galah: 60 ton; nila: 21.000 ton; mas: 100 ton; gurami:10.050 ton; udang vaname: 1.500 ton; tawes: 185 ton; patin :65 ton; lele: 32.000 ton; bawal: 3.900 ton; lainnya : 1000 ton)	%	100	100	Tidak ada
PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA					
	Produksi benih perikanan budidaya yang bersertifikat yang terdistribusi	persen	86	88	Tidak ada
Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan					
	Dukungan 25 % Terhadap Prosentase Benih Perikanan Budidaya Bersertifikat yang terdistribusi 84 % (terdiri dari benih nila 540.000.000 Ekor, benih lele 290.000.000 Ekor, benih ikan mas 12.000.000, udang galah 6.000.000 Ekor)	%	100	100	Tidak ada
	Rekomendasi hasil uji hama dan penyakit ikan	sampel	150	156	Tidak ada
Perbanyak Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya					
	Calon Induk Ikan	Kg	3,280	3,707	Tidak ada

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	Dukungan 75% Terhadap Prosentase benih perikanan budidaya bersertifikat terdistribusi 86% (terdiri dari benih nila 540.000.000 Ekor, benih lele 290.000.000 Ekor, benih ikan mas 12.000.000 Ekor, udang galah 6.000.000 Ekor)	%	100	100	Tidak ada
	Petunjuk teknis perikanan budidaya	Petunjuk teknis	2	2	Tidak ada
	Benih Ikan dan Udang	ekor	3,325,225	4,289,660	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA				
	Pengembangan Budaya Bahari				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah PPI Gesing	dokumen	1	1	Tidak ada
	Sosialisasi pengkayaan sumberdaya ikan lokal	kelompok	55	55	Tidak ada
	Lomba Pokdakan Ber-CBIB dan Pra-CBIB	kelompok	20	20	Tidak ada
	Lomba Vlogger dan Fotografi	Even	1	1	Tidak ada
	Video konten edukasi Kelautan dan Perikanan	judul/tema	6	6	Tidak ada
	Masterplan PPI Gesing	dokumen	1	1	Tidak ada
	Sekolah Lapang Budidaya MInapadi	angkatan	3	3	Tidak ada
	Pelatihan Budikdamber (15 paket)	kabupaten/kota	5	5	Tidak ada
	Pelatihan Budidamber	angkatan	3	3	Tidak ada
	Pelatihan Budidaya Ikan Hias	kali	-	-	Target <i>direfocusing</i> untuk penanganan pandemi covid-19
	Pelatihan Sistem Budidaya dengan Kincir	kali	4	4	Tidak ada
	Lomba Perahu Nelayan	kabupaten	3	3	Tidak ada

No	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Faktor Pendorong / Penghambat
1	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pemahaman masyarakat DIY tentang budaya bahari	persen	0.1	0.1	Tidak ada
	Pelatihan Minapadi	kali	1	1	Tidak ada
	Lomba Unit Pengolah Ikan Bersertifikat	kali	1	1	Tidak ada
	Lomba Pokmaswas	Kelompok	15	15	Tidak ada

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	325, 357	324,21	99,65	8.046.311.700	7.609.141.820	94,57
2	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi (%)	60	30	50	421.563.350	402.854.850	95,56
Jumlah						8.467.875.000	8.009.869.670	94,59
Program pendukung						5.061.661.060	4.792.791.580	94,69
Total Belanja Langsung						13.529.536.110	12.802.661.250	94,63

Berdasarkan tabel III.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. **8.467.875.000,00** terealisasi Rp. **8.009.869.670,00** atau **94,59%**. Sisa anggaran sebesar Rp. 458.005.380,00 atau 5,41% antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa pada Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Masterplan PPI Gesing.

- Sisa belanja perjalanan dinas dan rapat koordinasi karena menyesuaikan dengan tanggap darurat Covid-19
- Kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perikanan Tangkap dan Pelatihan Garam tidak dilaksanakan dikarenakan terdampak Covid 19
- Sisa pembayaran rekening listrik dan telepon sesuai dengan tagihan
- Belanja jasa konsultasi untuk DED Gesing yang tidak direalisasikan karena terdampak Covid-19.

Tabel III.10 Anggaran BTT Dinas Kelautan dan Perikanan 2020

No	Renops	Bulan	BTT	Volume	Jumlah (Rp)
1	Renop Tahap 2	Mei 2020	Handsoap	38	1,900,000
			Botol Handsoap	38	950,000
2	Renop Tahap 2 Phase 5	Juni 2020	Handsoap	38	1,900,000
			Botol Handsoap	38	950,000
			Honor petugas	16	1,552,000
3	Renop Tahap 2 Phase 9	September 2020	ATI	6	30,226,000
			Gemarikan	10	41,619,000
4	Renop Tahap 2 Phase 10	Oktober 2020	ATI	13	65,465,000
			Gemarikan	16	68,024,000
			Budilampit	8	117,732,000
5	Renop Tahap 2 Phase 11	November 2020	ATI	13	65,302,500
			Gemarikan	6	26,497,000
6	Renop Tahap 2 Phase 12	Desember 2020	Budilampit	8	109,532,000

3.3 Inovasi

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga telah melakukan inovasi pembangunan kelautan dan perikanan di DIY, antara lain adalah:

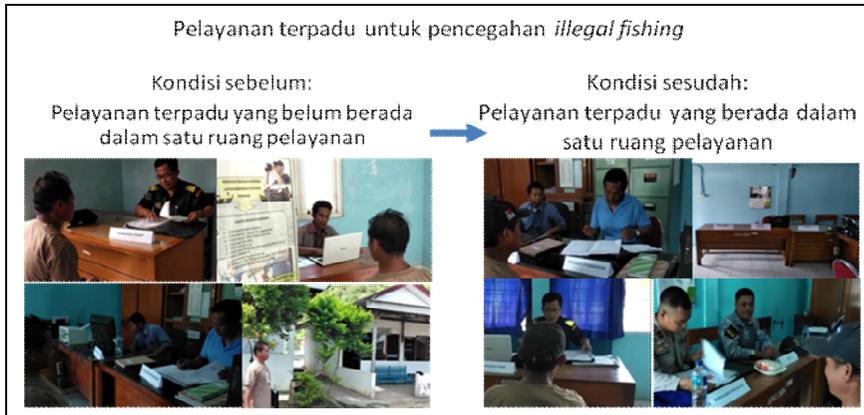
- ❖ Penyelamatan Plasma Nutfah Ikan Lokal (Wader Pari) dari Kepunahan dengan Domestikasi dan Pengkayaan Ekosistem
 - Bekerja sama dengan Fakultas Biologi UGM
 - Berupaya mengenalkan ikan lokal untuk usaha budidaya
 - Peningkatan populasi ikan waderpari di perairan umum

- ❖ Digitalisasi pelatihan sosialisasi/bimtek untuk pendampingan pelaku usaha perikanan pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan aturan Gubernur mengenai Status Tanggap Darurat
 - Pendampingan peningkatan pemahaman pelaku usaha melalui WAG
 - Penggunaan video tutorial yang dibagikan melalui YouTube
 - Interaksi tidak terbatas ruang dan waktu
- ❖ Perakitan Teknologi Udang Vannamee Spesifik Lokal di UKBAL BPTPB DIY
 - Aktifitas unit kerja BAL semakin fokus pada tuisi dan pencapaian target renstra
 - Pemahaman SDM tentang tugas, fungsi dan kinerja semakin baik
 - Daya hidup udang meningkat sebesar 11,5 % (dengan penggunaan probiotik, provitamin, dan curcuma)
 - Produksi udang meningkat 40%



Gambar III.2 Probiotik untuk Udang Vanamei

- ❖ Pengawasan dan Pelayanan Terpadu untuk Pencegahan Illegal Fishing
 - Petugas pelayanan memiliki komitmen yang lebih baik dalam pelayanan
 - Tersedianya SOP pelayanan di PPP Sadeng
 - Pelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu ruangan
 - Adanya informasi kepastian penyelesaian pelayanan



Gambar III.3 Pelayanan Terpadu di PPP Sadeng

- ❖ Penataan SDM Aparatur berbasis kompetensi dan bakat
 - Kompetensi SDM berimbang sehingga kinerja menjadi optimal
- ❖ Menjadi Pilot Project Manajemen Kinerja Menpan RB mewakili DIY
 - Pengukuran kinerja dipahami sehingga menjadi panduan pencapaian target kinerja
 - Mendorong budaya kinerja, terutama berkaitan dengan pemahaman indikator kinerja, pendokumentasian data capaian kinerja dan pengukuran kinerja.
- ❖ Mentoring integritas kinerja level pengawas (Eselon IV)
 - Pengukuran kinerja dipahami sehingga menjadi panduan pencapaian target kinerja
 - Mendorong budaya kinerja, terutama berkaitan dengan pemahaman indikator kinerja, pendokumentasian data capaian kinerja dan pengukuran kinerja.
- ❖ Menerima pelaporan keluhan pelanggan melalui website dan media sosial
 - Layanan pengaduan online (website), media sosial dan offline
- ❖ Fasilitasi dan pendampingan kelola limbah organik untuk kemandirian pakan ikan (ikan mapan)
 - Penurunan biaya pakan ikan hingga 40 % dari harga pakan pabrikan.
 - Keuntungan/ laba dari pembudidaya meningkat 100%

- Percepatan pengembangan skala usaha yang berimbang pada peningkatan pendapatan pembudidaya ikan khususnya sekaligus peningkatan produksi perikanan budidaya.
- Pemanfaatan limbah organik (sisa olahan ikan) mendukung Green Policy



Gambar III.4 Limbah Organik Untuk Kemandirian Pakan Ikan (Ikan Mapan)

Penghargaan yang pernah diterima selama tahun 2020 adalah:

Tabel III.11 Penghargaan 2020

Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Tingkat/ Juara Ke-	Keterangan	Foto
Juara I Pelaporan Monitoring Penyakit Ikan melalui SSMP	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	Nasional	Pertama	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY antara lain keterbatasan kualitas dan kuantitas pelaku usaha kelautan dan perikanan. Selain itu juga dengan adanya pandemi covid juga sedikit mempengaruhi usaha kelautan dan perikanan tetapi dapat diatasi dengan inovasi dan adaptasi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2. Faktor keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan, selain inovasi juga peran *stakeholder* kelautan dan perikanan dalam mendukung secara aktif untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Optimalisasi kualitas dan kuantitas pelaku usaha kelautan dan perikanan di DIY melalui program dan kegiatan pelatihan, bimtek dan sosialisasi peningkatan kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan. Inovasi dilakukan untuk perikanan budidaya seperti ikan mapan, budidaya vannamee kolam bulat, pemasaran *online* dan lain-lain.
2. Koordinasi dan sinergi dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat serta *stakeholder* kelautan dan perikanan.

LAMP IRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897
		Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi (%)	20	30	60	80	100

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2020



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ꦝꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦠꦶꦏꦤ꧀ꦢꦶ

Jalan Sagan III/4 Yogyakarta, Telepon (0274) 512386, Faksimile (0274) 560386
Website: www.dalautkan.jogjapro.go.id, Email: dalautkan@jogjapro.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dengan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. BAYU MUKTI SASONGKA, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGGU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 6 November 2020

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN DIY



IR. BAYU MUKTI SASONGKA, M.Si
NIP. 19541105 199102 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
 Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	juta rupiah	325.357	Triwulan I	325.357
					Triwulan II	325.357
					Triwulan III	325.357
					Triwulan IV *	325.357
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	persen	60	Triwulan I	30
					Triwulan II	30
					Triwulan III	30
					Triwulan IV	60

Dukungan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
Total Jumlah Anggaran	22.260.199.210,00	13.529.536.110,00	(8.730.663.100,00)	
1. Program Administrasi Perkantoran	4.270.360.500,00	3.714.919.060,00	(555.441.440,00)	Sumber Anggaran: 1. APBD: Rp.11.745.989.110,00 2. Danais: Rp.1.783.547.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.659.036.000,00	1.249.005.000,00	(2.410.031.000,00)	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	224.680.000,00	97.737.000,00	(126.943.000,00)	
4. Program Pengelolaan Pelabuhan	236.644.000,00	91.118.750,00	(145.525.250,00)	
5. Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	835.764.750,00	421.563.350,00	(414.201.400,00)	
6. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2.149.305.520,00	407.147.520,00	(1.742.158.000,00)	
7. Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	3.558.445.500,00	1.799.393.800,00	(1.759.051.700,00)	
8. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.099.987.120,00	1.973.043.120,00	(1.126.944.000,00)	
9. Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya	3.075.975.820,00	1.992.061.510,00	(1.083.914.310,00)	
10. Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (Urusan Kebudayaan)	1.000.000.000,00	1.783.547.000,00	783.547.000,00	
11. Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Urusan Tata Ruang)	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 39,22% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
2. *) Data Capaian Kinerja tersedia di Triwulan IV (Sumber BPS)
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi : Rp.1.193.720.000,00
 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP : Rp.280.223.000,00
 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap : Rp.143.477.000,00
 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya : Rp.423.080.000,00
 - Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : Rp.194.794.000,00
 - Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan : Rp. 70.396.000,00
 - Program Pengelolaan Ruang Laut : Rp. 81.750.000,00

Yogyakarta, 6 November 2020

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGGU BUWONO X



PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN DIY



DISLAUTKAP

Dr. BAYU MUKTI SASONGKA, M.Si
NIP. 19641103 199102 1 001

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Youth Center, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mali, Sleman
Telepon (0274) 582009 Faksimile (0274) 512567

Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> Email: inspektorat@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 13-03-2020

Nomor	: 700/00367	Kepada	
Lampiran	: -	Yth. Gubernur	
Sifat	: Biasa	Daerah Istimewa Yogyakarta	
Hal	: Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem AKIP Tahun 2019 pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	di-	Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka diindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 40/II/INSP/2020 Tanggal 3 Februari 2020 tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD Tahun 2019 pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan tujuan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Tim Evaluasi (Evaluators) Inspektorat DIY melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.
 - b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;

- 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja yang Dilaporkan (Output);
 - 2) Kinerja yang Dilaporkan (Outcome);
 - 3) Kinerja yang Dilaporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memperoleh nilai sebesar **88,20** kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel;
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,69 atau 92,30% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,43 atau 89,72% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,94 atau 86,25% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,25 atau 82,50% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 14,90 atau 74,48% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY pada Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2018, sudah dilakukan perbaikan kinerja pada Aspek Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan berupaya meningkatkan kinerja pada Aspek Perencanaan

pada dokumen Renstra yang telah direvisi, Aspek Pengukuran Kinerja khususnya Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja agar pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, Aspek Pelaporan Kinerja, khususnya pada penyampaian informasi kinerja yang informatif dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, khususnya Kinerja yang dilaporkan pada capaian kinerja lebih baik dari sebelumnya (output dan IKU).

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,


INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
WIKOS SANGKORO, SE, M.ACC.
NIP. 196002151994031005

Tembusan:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ดิสลาอูทกัน จักรวรรดิ 2 แดงอูทกัน ดินันดาอูทกัน

Alamat Jalan Sagan III / 4 Telepon (0274) 512386 Faksimile (0274) 560386
Website : <http://www.dislautkan.jogjaprov.go.id>, Email :
dislautkan@jogjaprov.go.id

Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/00867 tanggal 13 April 2020, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem AKIP Tahun 2019 pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY</p> <p>Rekomendasi: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan berupaya meningkatkan kinerja pada Aspek Perencanaan Kinerja khususnya Implementasi Renstra untuk mencantumkan inovasi pada dokumen Renstra yang telah direviu, Aspek Pengukuran Kinerja khususnya Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja agar pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, Aspek Pelaporan Kinerja, khususnya pada penyampaian informasi kinerja yang informatif dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organsiasi, khususnya Kinerja yang dilaporkan pada capaian kinerja lebih baik dari sebelumnya (output dan IKU).</p>	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dislautkan akan menambahkan inovasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dan telah diisikikan juga di aplikasi sengguh2. Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja setiap bulan dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tanggal 3.3. Laporan sakiptahun 2020 akan memuat tentang penyampaian informasi kinerja yang informatif dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organsiasi baik output maupun IKU di eselon 2 dan 3 dengan tetap berkoordinasi dengan Biro Organisasi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kejala,
Ir. Bawu Muliati Sasongka, M.Si
1103 199102 1 001

*Lampiran 5. Surat Edaran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berupa
Himbauan Pembelian Produk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan DIY*



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ꦢꦶꦭꦭꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦥꦸꦏꦸꦥꦺꦭꦸꦸꦱꦁꦏꦺꦭꦭꦸꦠꦤ꧀ꦥꦺꦫꦶꦏꦤ꧀ꦢ

Jalan Sagan III/4 Yogyakarta, Telepon (0274) 512386, Faksimile (0274) 560386
Website: www.dislautkan.jogjaprov.go.id; Email: dislautkan@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 6 April 2020
Kepada Yth:
Pegawai Lingkup Dislautkan DIY

SURAT EDARAN
Nomor: 849/02632

TENTANG

HIMBAUAN PEMBELIAN PRODUK PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tanggal 20 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta maka diperlukan adanya langkah masif dan dukungan nyata dalam rangka mendorong meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk-produk hasil perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di DIY.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini kami himbau agar semua pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melakukan pembelian, menginformasikan dan membantu memasarkan baik secara *online* maupun *offline* produk-produk hasil perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di DIY.

Demikian untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY



Bayu Mukti Sasongka, M.Si

NIP. 196491031991021001